

I N D E K S P E M B A N G U N A N M A N U S I A

KABUPATEN MAPPI

2020

<https://mappikab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAPPI**

I N D E K S P E M B A N G U N A N M A N U S I A

KABUPATEN MAPPI

2020

<https://mappikab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAPPI**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MAPPI TAHUN 2020

Nomor Katalog : 4102002.9414

Nomor Publikasi :

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21,5 cm

Jumlah Halaman : x + 96 halaman

Naskah :
Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Mappi

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi

Gambar Sampul :
Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Mappi

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi

Dicetak Oleh :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik. Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Publikasi “INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN MAPPI TAHUN 2020” dapat terselesaikan. Dengan adanya informasi ini diharapkan pemerintah daerah dapat membangun suatu konsensus untuk memperbaharui komitmen bersama dan membuat kebijakan yang tepat terhadap pembangunan manusia di Kabupaten Mappi.

Indikator-indikator yang dimuat dalam penyusunan IPM ini diharapkan berguna bagi para perencana dalam penyusunan program pembangunan manusia dan dipakai sebagai parameter untuk mengevaluasi tahapan-tahapan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan manusia.

Pada akhirnya kami menyadari sepenuhnya, dalam penerbitan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaan penerbitan berikutnya. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diterbitkan diucapkan terimakasih.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kepi, November 2021

KEPALA BPS KABUPATEN MAPPI



Geressida Sihombing, S.E., M.Si.

NIP. 19740731 199403 2 004

<https://mappikab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan dan Sasaran	5
1.3. Ruang Lingkup	6
1.4. Istilah istilah yang digunakan	7
BAB II DATA DAN METODOLOGI	11
2.1. Basis Data Pembangunan Manusia	13
2.2. Pendekatan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia ...	15
2.3. Konsep Penghitungan IPM	20
2.4. Tahapan Penghitungan IPM	26
2.5. Kategori Peningkat Pembangunan Manusia	28

BAB III Gambaran Umum Wilayah.....	29
3.1. Sejarah Kabupaten Mappi.....	31
3.2. Kependudukan	33
 BAB IV GAMBARAN IPM DI KABUPATEN MAPPI	39
4.1. Komponen IPM.....	41
4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mappi...	47
4.3. Laju Pertumbuhan IPM	52
 BAB V PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	53
5.1. Partisipasi Sekolah	55
5.2. Tingkat Pendidikan	61
5.3. Kualitas Pelayanan Pendidikan.....	62
 BAB VI PEMBANGUNAN KESEHATAN	67
6.1. Fasilitas Kesehatan	69
6.2. Tingkat Morbiditas.....	71
6.3. Kesehatan Balita	73
6.4. Perumahan dan Lingkungan.....	75

BAB VII PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN	83
7.1. Pendapatan dan Pengeluaran	85
7.2. Ketenagakerjaan.....	91

<https://mappikab.bps.go.id>

<https://mappikab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	24
Tabel 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mappi menurut Distrik dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	34
Tabel 3.2 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mappi Tahun 2020	37
Tabel 4.1 Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Mappi Tahun 2019 – 2020.....	52
Tabel 5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi, Tahun 2020	57
Tabel 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mappi Tahun 2020.....	58
Tabel 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2020	60
Tabel 5.4 Penduduk Kabupaten Mappi Usia 5 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Tahun 2020.....	62
Tabel 5.5 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mappi Tahun 2020	65

Tabel 6.1	Facilities and Health Personnel in Mappi Regency Year 2020.....	71
Tabel 6.2	Percentage of Residents who Suffered Sick during Mappi Regency Year 2020	72
Tabel 6.3	Percentage of Women 15-49 Years who Ever Married and Assisted the Last Birth Process According to Education Level Mappi Regency Year 2020	75
Tabel 6.4	Percentage of Households According to Characteristics and Main Water Source Used in Households for Cooking/Bathing/Washing/etc, 2020	79
Tabel 7.1	Average per capita expenditure per month Mappi Regency Year 2020 (Rp).....	89
Tabel 7.2	Employment Indicator Mappi Regency Year 2020 (person)	93

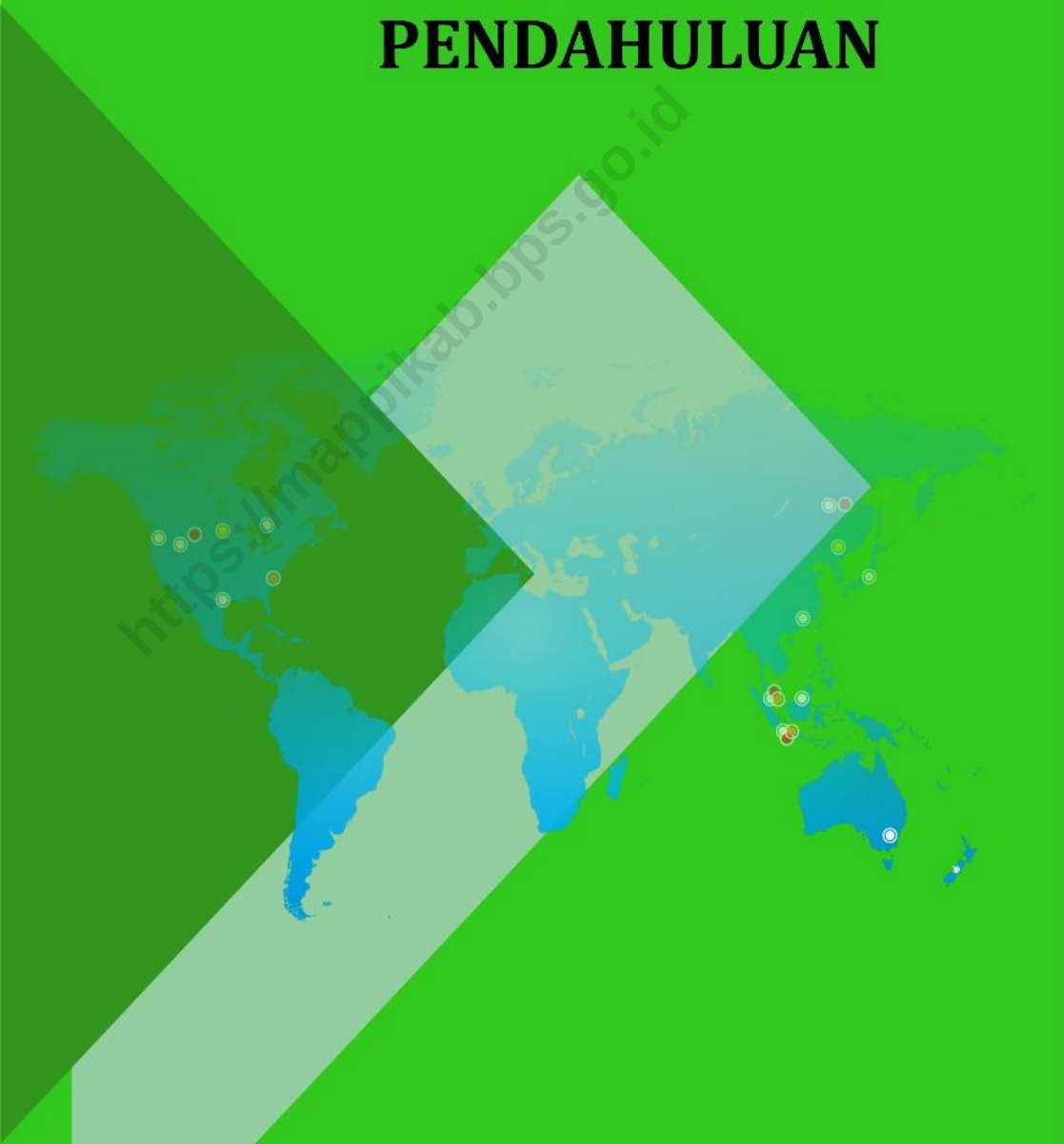
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia	13
Gambar 2.2 Model Penggunaan Alat Penghubung <i>Input</i> dan <i>Output</i>	17
Gambar 2.3 Pendekatan dari “Atas ke Bawah” (<i>Top down approach</i>)	18
Gambar 2.4 Pendekatan dari “Bawah ke Atas” (<i>Bottom-up approach</i>)	19
Gambar 2.5 Pendekatan Kombinasi <i>Top-Down</i> dan <i>Bottom-Up</i> (<i>Hybrid approach</i>)	20
Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Mappi Menurut Distrik	32
Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020	42
Gambar 4.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020	43
Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020	45
Gambar 4.4 Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Mappi (ribu rupiah) Tahun 2016-2020	47
Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mappi Tahun 2016 – 2020	49

Gambar 4.6	Capaian IPM per Kabupaten/Kota Tahun 2020	51
Gambar 5.1	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020	63
Gambar 6.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih, 2020.....	78
Gambar 6.2	Persentase rumah tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020.....	80
Gambar 6.3	Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Mappi, 2019	81
Gambar 7.1	Gini Ratio Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020	88
Gambar 7.2	Persentase pengeluaran Rumah Tangga menurut jenis pengeluaran (makanan dan non makanan) di Kabupaten Mappi Tahun 2020	90
Gambar 7.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2020	94
Gambar 7.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2020	96

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi.

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat) komponen utama:

- a) *Produktivitas*. Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.
- b) *Pemerataan*. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama.
- c) *Keberlanjutan*. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.
- d) *Pemberdayaan*. Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses aktivitasnya.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa kini dan akan datang sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaanya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua

tujuan tersebut di atas diletakan dalam kerangka untuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri yang ditandai dengan beragamnya pilihan/cara untuk hidup.

Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. *Human Development Report* (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia. Adapun komponen-komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi:

- Lamanya Hidup (*longevity*),
- Pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*), dan
- Standar Hidup (*decent living*).

Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kabupaten Mappi, maka disusunlah publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mappi tahun 2020”, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Mappi.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya,

sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mappi. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya manusia di Kabupaten Mappi, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam penulisan ini meliputi:

- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi; lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).
- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Mappi.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi:

- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran

besaran IPM yang meliputi: lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).

- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor- sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Mappi.
- Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Mappi.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Mappi.

1.3.2 Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Mappi.

1.4 Istilah-istilah yang digunakan (Terminologi)

- *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup, pendidikan dan standar hidup.
- *Indeks Kesehatan*, salah satu dari komponen IPM. Nilai ini berkisar antara 0 – 100.

BAB I PENDAHULUAN

- *Indeks Pendidikan*, Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- *Indeks Daya Beli/Standar Hidup*, didasarkan pada paritas daya beli (PPP) yang disesuaikan dengan rumus atkinson.
- *Angka Harapan Hidup (e_0)*, perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada pola mortalitas menurut umur.
- *Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)*, proporsi penduduk 7 tahun ke atas yang sedang bersekolah per jumlah penduduk pada umur yang sama saat ini.
- *Angka Partisipasi Sekolah*, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, dan 16-18) yang masih duduk di bangku sekolah.
- *Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Long of Time School Average*, menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.
- *Angka Partisipasi Murni (APM)/Pure Participant Index*, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.
- *Partisipasi Angkatan Kerja*, menggambarkan persentase penduduk yang membutuhkan pekerjaan (aktif secara ekonomis) atau memberi gambaran seberapa besar keterlibatan penduduk dalam ekonomi produktif.

- *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) / Opened Unemployment Level*, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di kalangan angkatan kerja.
- *Setengah Menganggur / Half Unemployment*, menggambarkan tidak bekerja penuh yang dapat dilihat dari jam kerja, produktifitas dan pendapatan.
- *Kontribusi Sektor Perekonomian dalam Penyerapan Tenaga Kerja*, adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui andil setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.
- *Persentase Penolong Persalinan*, adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.
- *Rata-rata Lama Sakit*, adalah indikator yang menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk. Indikator ini juga menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita. Semakin besar nilai indikator ini, semakin besar kerugian yang dialami.
- *Angka Sakit*, adalah indikator yang memberi gambaran prevalensi kesakitan (keluhan kesehatan) oleh masyarakat dan juga digunakan untuk melihat tingkat kesehatan penduduk suatu daerah.

<https://mappikab.bps.go.id>

BAB II

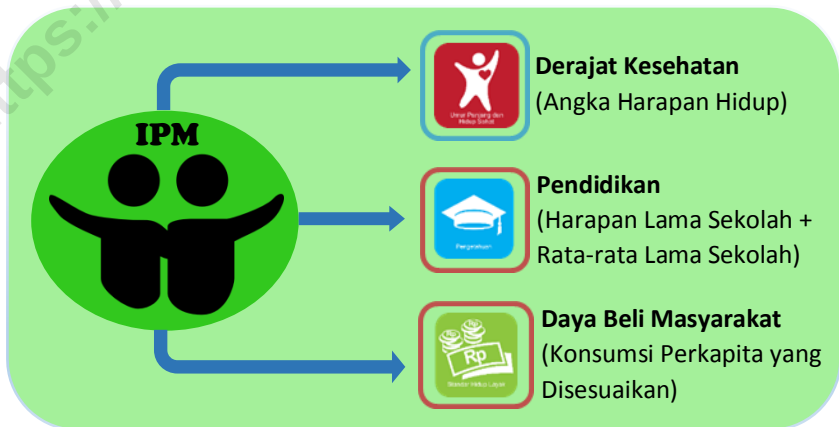
DATA DAN METODOLOGI



2.1. Basis Data Pembangunan Manusia

Dalam melakukan perencanaan pembangunan manusia perlu disadari bahwa yang berguna bagi perencanaan dan pembuatan kebijakan hanyalah data atau informasi yang memberikan gambaran keadaan sebenarnya (*represent reality*). Oleh karena itu perlu dipahami secara memadai jenis pengumpulan data serta kualitas data yang dikumpulkan. Perencana pembangunan manusia juga harus dapat memanfaatkan secara optimal data yang relevan baik yang dikumpulkan melalui sensus dan survei maupun yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Data indeks pembangunan manusia meliputi derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat (Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Komponen Indeks Pembangunan Manusia



2.1.1. Sumber Data

Informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan manusia dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perencana harus menyadari bahwa kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi atau menunjang sehingga keduanya diperlukan untuk analisis, monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Data berasal dari instansi dan hasil survei lapangan tentang indikator kesejahteraan rakyat yang mencakup informasi mengenai kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, perumahan dan sanitasi, dan pengeluaran rumah tangga.

Sumber data lain adalah yang dikumpulkan dengan memanfaatkan sistem pelaporan yang dilakukan oleh Dinas/Instansi teknis sebagai hasil catatan administrasi pelayanan yang bersangkutan. Data berdasarkan laporan administratif didasarkan pada laporan implementasi program/kegiatan, laporan sistem pelayanan, dan sebagainya. Data yang dihasilkan memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan selama masa periode tertentu, biasanya bulanan dan tahunan.

Untuk mengetahui secara lebih mendalam dan spesifik tentang suatu keadaan yang tidak mungkin dapat diperoleh dari suatu hasil survei dan sensus, misalnya untuk mencari jawaban

tentang suatu keadaan atau fenomena, suatu studi khususnya yang disebut *Rapid Appraisal* atau *Rapid Assesment* dilakukan. Studi ini didasarkan pada sampel kecil dan tidak acak (*non-random sample*), bertujuan untuk mengetahui secara cepat jawaban atas fenomena yang diselidiki. Biasanya studi semacam ini juga dilakukan untuk dapat menghasilkan rekomendasi tentang langkah atau intervensi yang paling mungkin dapat dilakukan untuk memperbaiki atau menyelesaikan suatu fenomena dan persoalan.

2.1.2.Data Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perencanaan pembangunan manusia perlu dipertimbangkan untuk menyusun Data Basis Pembangunan Manusia sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan analisis situasi dan penyusunan rencana pembangunan. Data ini berisi informasi atau indikator-indikator pembangunan manusia. Data yang relevan tidak hanya mengenai sektor-sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mengenai sektor-sektor ekonomi seperti PDRB perkapita.

2.2. Pendekatan Pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). UNDP

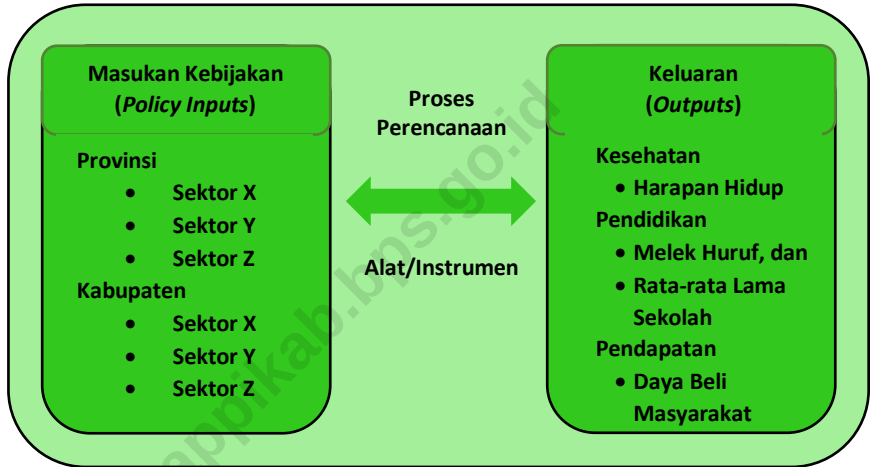
sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*logetivity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

Model sebagaimana pada Gambar 2.2 yang menggambarkan mekanisme hubungan antara *input-proces-output* (IPO), dalam hal ini adalah kebijakan daerah berupa penetapan komposisi alokasi anggaran daerah per sektor/program dalam RAPBD. Sedangkan output dalam model ini diwujudkan dalam tiga parameter IPM.

Dalam model ini, IPM sebagai indeks komposit, bukanlah berperan sebagai alat perencanaan (*planning tools*) tetapi merupakan “*outcome*” atau hasil dari suatu proses perencanaan. Sekalipun IPM bukanlah sebagai alat perencanaan, namun dapat dimanfaatkan untuk menjadi arahan bagaimana anggaran pembangunan daerah seharusnya dialokasikan agar mampu meningkatkan pembangunan manusia yang tercermin dengan semakin tingginya IPM. Untuk menghubungkan antara faktor input (RAPBD) di satu sisi dan faktor *output* (tiga parameter IPM), dalam proses perencanaannya untuk model ini diperlukan sebuah alat dalam bentuk *worksheet* (lembar kerja) yang

dengan mudah digunakan melalui pemanfaatan komputer dan perangkat lunaknya dalam bentuk program aplikasi.

Gambar 2.2 Model Penggunaan Alat Penghubung *Input* dan *Output*



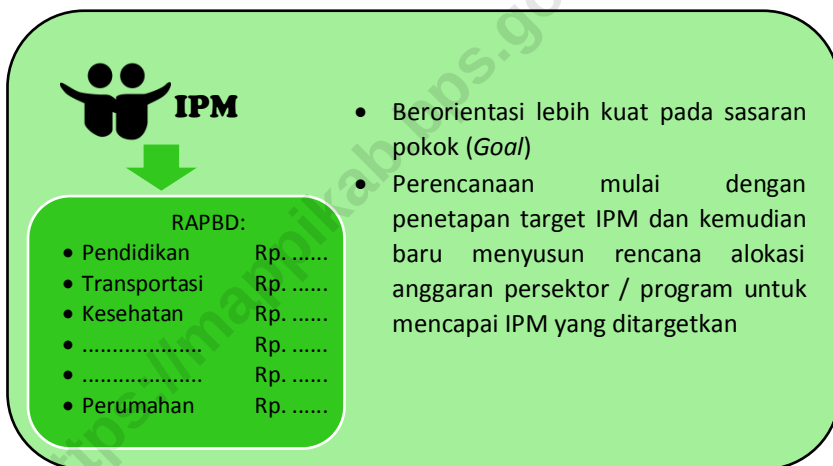
Adapun mengenai ketiga pendekatan yang terbangun sesuai kerangka pikir tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1. Top Down Approach

Pendekatan ini (lihat Gambar 2.3), bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah. Berangkat dari target tersebut kemudian disusunlah rancangan alokasi sektor-sektor APBD dengan menggunakan alat/instrumen perencanaan dalam bentuk "worksheet" yang

mudah digunakan dengan bantuan komputer. Dengan menggunakan *worksheet* ini rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai.

Gambar 2.3 Pendekatan dari “Atas ke Bawah” (*Top down approach*)

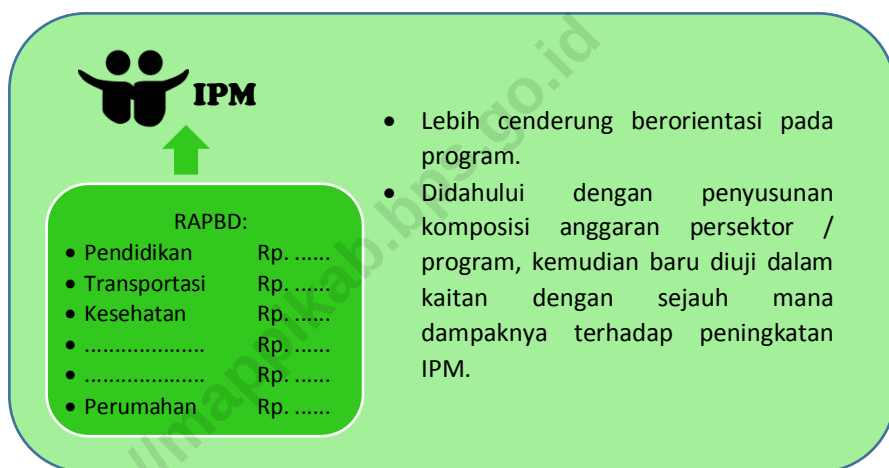


2.2.2. Bottom Up Approach

Pendekatan ini (Gambar 2.4), berbanding terbalik dengan pendekatan yang pertama. Pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan dari bawah (*bottom up*), berangkat dari target IPM yang ingin dicapai, tetapi dimulai dengan menetapkan komposisi rencana

anggaran persektor/program sebagaimana yang selama ini dilakukan, kemudian baru dihitung berapa pengaruhnya terhadap kenaikan IPM.

Gambar 2.4 Pendekatan dari “Bawah ke Atas” (*Bottom-up approach*)



2.2.3. Hybrid Approach

Pendekatan ini (Gambar 2.5) merupakan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua, di mana dalam aplikasinya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi IPM yang ditargetkan dan sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis.

Dalam proses pengembangan IPM dan perencanaan pembangunan daerah, masih terbuka adanya berbagai masukan penyempurnaan. Upaya pemantapan model ini akan diteruskan melalui tahapan-tahapan rencana pengembangan, yang di pusat dilaksanakan Ditjen Bangda bekerjasama dengan BPS dan UNDP, sedangkan di daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.

Gambar 2.5 Pendekatan Kombinasi *Top-down* dan *Bottom-up* (Hybrid approach)



2.3. Konsep Penghitungan IPM

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah IPM. IPM merupakan

suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

2.3.1. Usia Hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 . Angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara industri yang telah maju.

Seperti halnya IMR, e_0 sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia e_0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan e_0 yang diperoleh dengan metode ini merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

2.3.2. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak tahun 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua diakui kurang sesuai sebagai indikator dampak. Penggantian dilakukan semata-mata karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global, suatu kesulitan yang bagi keperluan internal Indonesia dapat diatasi dengan tersedianya data Susenas Kor atau data Instansional.

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu: tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tabel 2.1 menyajikan faktor konversi dari tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan, lamanya sekolah (*Years School-YS-*) dihitung berdasarkan formula di bawah ini:

$$YS = \text{*Tahun Konversi + Kelas Tertinggi yang Pernah Diduduki*} - 1$$

Dari data lama sekolah masing-masing individu kemudian digunakan sub program MEANS dalam paket SPSS untuk menghitung rata-rata lama sekolah (MYS) agregat. Dalam penghitungan MYS, BPS menggunakan populasi penduduk berusia 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Sedangkan pihak UNDP memakai populasi penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan alasan karena penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah.

BAB II DATA DAN METODOLOGI

Tabel 2.1 Tahun Konversi dari Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

NO	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tahun Konversi
(1)	(2)	(3)
1.	Tidak / belum pernah sekolah	0
2.	SD	6
3.	SLTP	9
4.	SLTA/SMU	12
5.	Diploma I	13
6.	Diploma II	14
7.	Akademi/Diploma III	15
8.	Diploma IV/Sarjana	16
9.	Magister (S2)	18
10.	Doktor (S3)	21

2.3.3. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup, dan pengetahuan unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak.

Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap

mempertahkannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahkannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka *GDP riil* perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Untuk keperluan perhitungan IPM data dasar PDRB perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk (yang merupakan fokus IPM). Sebagai penggantinya digunakan untuk konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama.

Perhitungan PPP/unit dilakukan sesuai rumus:

$$\frac{PPP}{Unit} = \frac{\sum_{j=1}^{27} E_{(i,j)}}{\sum_{j=1}^{27} (p_{(9,j)} \cdot q_{(i,j)})}$$

Dimana

$E_{(i,j)}$:Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota ke- i ,
 $p_{(9,j)}$:Harga komoditi- j .

$q_{(i,j)}$: Total komoditi j (unit) yang dikonsumsi di kota/kabupaten ke- i

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} D_{(i)}^* &= D_{(i)} & , \text{ Jika } D_{(i)}^* \leq Z \\ D_{(i)}^* &= Z + 2(Z)^{(1/2)} & , \text{ Jika } Z \leq D_{(i)}^* \leq 2Z \\ D_{(i)}^* &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(D_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} & , \text{ Jika } 2Z \leq D_{(i)}^* \leq 3Z \\ D_{(i)}^* &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(D_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} \\ &\quad + 4(D_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} & , \text{ Jika } D_{(i)}^* \leq Z \end{aligned}$$

Dimana:

D = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit.

Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya menggunakan garis kemiskinan).

2.4. Tahapan Penghitungan IPM

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Tahap pertama** penghitungan IPM adalah setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{❖ Dimensi Kesehatan} \quad : I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

$$\text{❖ Dimensi Pendidikan} \quad : I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$\text{❖ Dimensi Pengeluaran} \quad : I_{Pengeluaran} =$$

$$\frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{max} - \ln(\text{pengeluaran})_{min}}$$

- **Tahapan kedua** perhitungan IPM adalah IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

- **Tahap ketiga** adalah menghitung Reduksi Shortfall, yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu tertentu.

$$r = \left(\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ideal} - IPM_t} \right)^{\frac{1}{n}}$$

Dimana:

- IPM_t : IPM pada tahun- t ,
- IPM_{t+n} : IPM pada tahun $(t+n)$,
- IPM_{ideal} : 100.

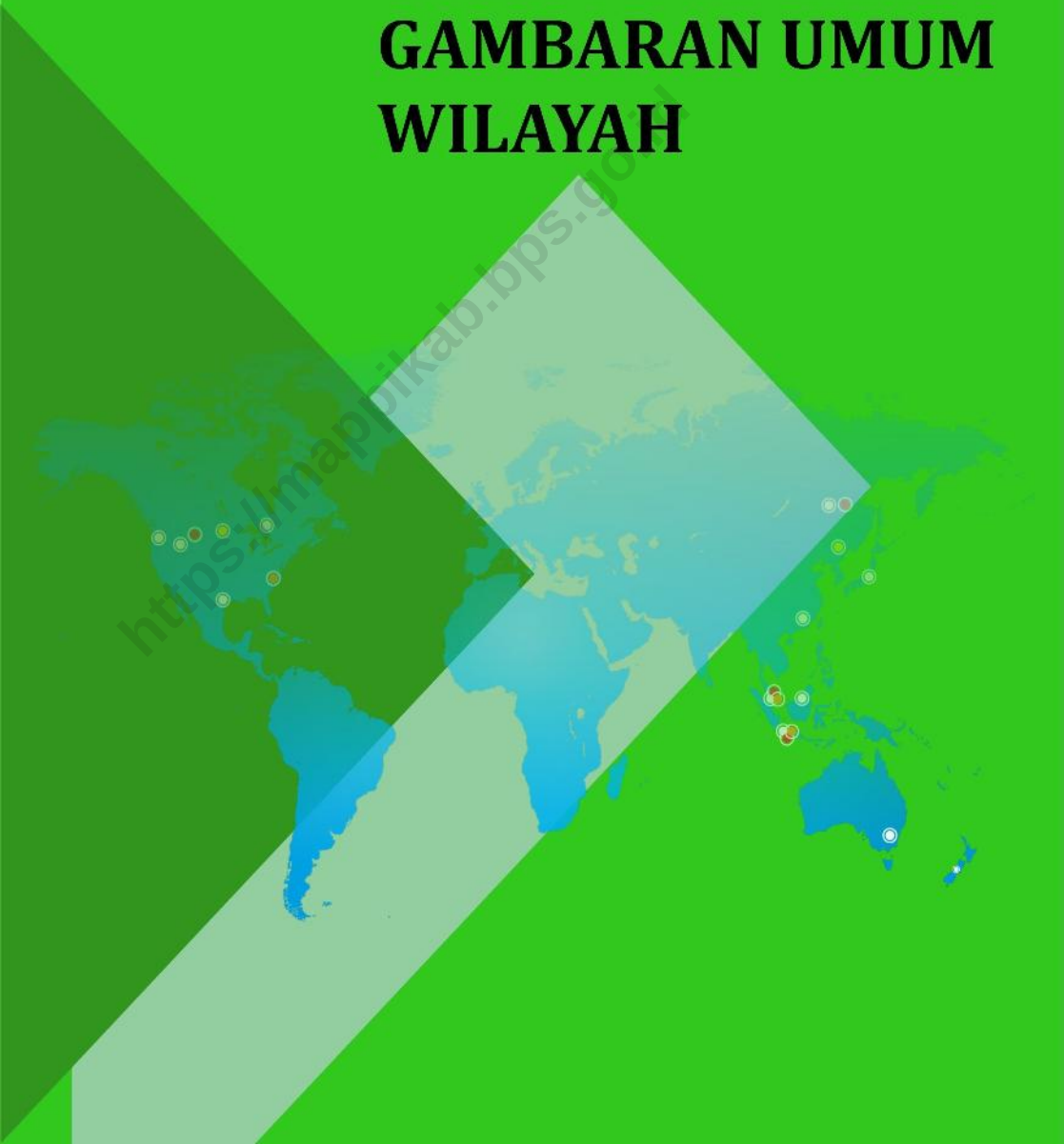
2.5. Kategori Peringkat IPM

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,00 – 100,00 dengan kategori sebagai berikut:

- Sangat tinggi : IPM lebih dari 80,00
- Tinggi : IPM antara 70,00 – 79,99
- Sedang : IPM antara 60,00 – 69,99
- Rendah : IPM kurang dari 60,00

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH



3.1 Sejarah Kabupaten Mappi

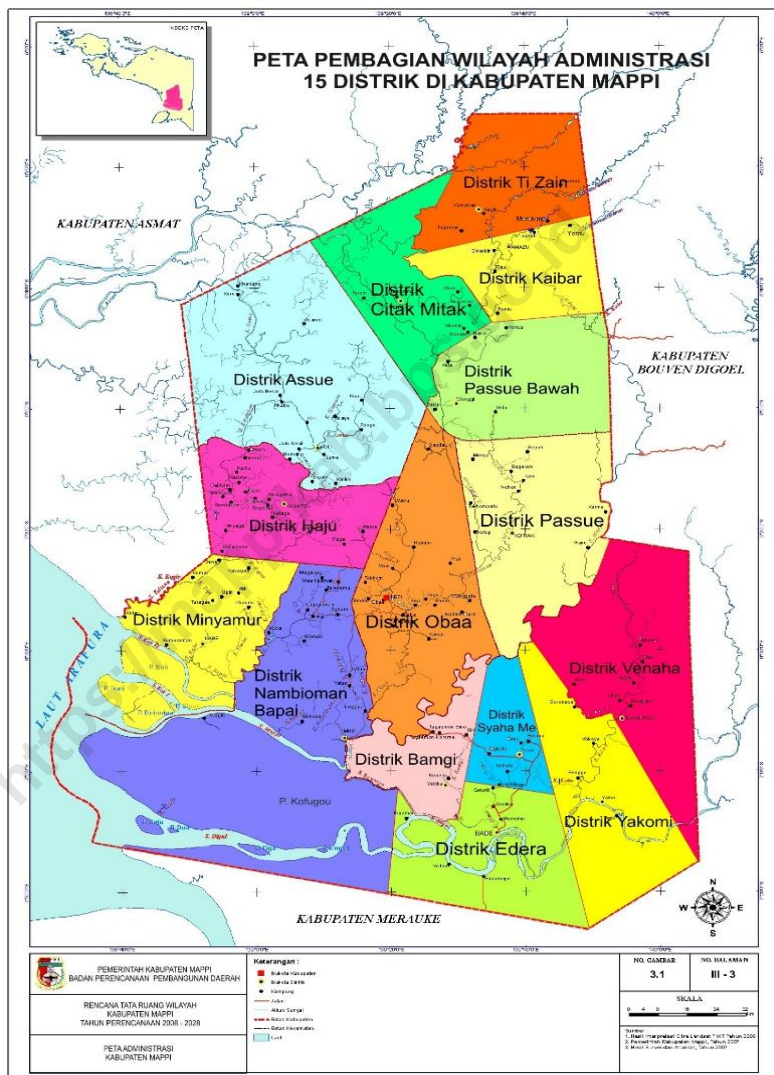
Kabupaten Mappi lahir pada tahun 2002 dengan dasar hukum Undang Undang nomor 26 tahun 2002. Layaknya Kabupaten Boven Digoel dan Asmat, Kabupaten Mappi merupakan pemekaran dari wilayah administrasi Kabupaten Merauke yang berada di bagian selatan Provinsi Papua.

Pada tahun 2004, Kabupaten Mappi secara resmi terbentuk terdiri dari 6 distrik dan 136 kampung dan 1 kelurahan. Pada tahun 2008, Mappi mekar menjadi 10 distrik, lalu pada tahun 2012 hingga sekarang mekar menjadi 15 distrik, 162 kampung dan 2 kelurahan. Distrik Obaa memiliki jumlah kampung terbesar, yaitu sebanyak 23 kampung dan 1 kelurahan. Bamgi dan Yakomi memiliki jumlah kampung terkecil, masing-masing sebanyak 5 kampung. Nama-nama distrik tersebut yaitu Distrik Obaa, Nambaioman Bapai, Edera, Venaha, Minyamur, Passue, Haju, Assue, Citak Mitak, Kaibar, Syahcame, Bamgi, Yakomi, Passue Bawah, Ti-Zain. Ibukota Kabupaten Mappi berpusat di Distrik Obaa.

Kabupaten Mappi terletak antara 5°10'– 7°30' Lintang Selatan dan 138°30'– 140°10' Bujur Timur. Kabupaten Mappi memiliki luas 28.518 km². Sebelah Utara wilayah administrasi Kabupaten Mappi berbatasan dengan Kabupaten Asmat. Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan wilayah Kabupaten Merauke. Sebelah Barat berbatasan langsung

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

dengan Kabupaten Asmat dan Laut Arafura. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel.



LITBANG-BAPPEDA KAB. MAPPI 2009

3.2 Kependudukan

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan. Penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas serta pengarahan mobilitasnya mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk.

3.2.1. Jumlah dan Sebaran Penduduk

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks penduduk sebagai potensi SDM, mengandung arti bahwa penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Tabel 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Mappi menurut Distrik dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Distrik	Penduduk (orang)			
		L	P	Total	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nambioman Bapai	4657	4637	9294	100.43
2	Minyanmur	2902	2629	5531	110.38
3	Edera	4496	4410	8906	101.95
4	Venaha	1339	1234	2573	108.51
5	Obaa	18050	16906	34956	106.77
6	Passue	3440	3301	6741	104.21
7	Haju	5076	4648	9724	109.21
8	Assue	5521	5028	10549	109.81
9	Citak Mitak	2806	2473	5279	113.47
10	Kaibar	1207	1103	2310	109.43
11	Syahcame	1466	1390	2856	105.47
12	Bangi	1377	1251	2628	110.07
13	Yakomi	1094	996	2090	109.84
14	Passue Bawah	1421	1408	2829	100.92
15	Ti-Zain	1066	963	2029	110.70
Jumlah		55918	52377	108295	106.76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Mappi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 103.292 jiwa pada tahun 2019 menjadi 108.295 jiwa pada tahun 2020, yang terdiri dari 55.918 jiwa penduduk laki-laki dan

52.377 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kabupaten Mappi relatif tersebar secara merata di beberapa distrik. Seperti tahun sebelumnya penduduk paling banyak tinggal di Distrik Obaa sebagai ibukota kabupaten, yaitu sebanyak 34.956 jiwa. Sedangkan Distrik Yakomi mempunyai jumlah penduduk terkecil dengan jumlah hanya 2.090 jiwa.

3.2.2. Komposisi Penduduk

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut jenis kelamin (*sex ratio*) dan angka ketergantungan (*dependency ratio*). *Sex ratio* didefinisikan sebagai perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini sangat penting artinya untuk melihat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi kondisi dari sosial dan ekonomi rumah tangga serta keberlangsungan reproduksi. Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin di Kabupaten Mappi menunjukkan angka rasio yang mendekati 100 yaitu 106,76 artinya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mappi 6,76 persen lebih banyak daripada penduduk wanita, dengan kata lain untuk setiap 10.000 penduduk wanita terdapat 10.676 penduduk laki-laki. Distrik yang mempunyai

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

sex ratio paling besar di tahun 2020 adalah Distrik Citakmitak yaitu sebesar 113,47, sedangkan Distrik Nambioman Bapai merupakan distrik dengan nilai *sex ratio* yang mendekati 100, yaitu sebesar 100,43.

Selain *sex ratio*, pengelompokan penduduk berdasarkan umur produktif dan tidak produktif juga sangat penting. Semakin banyak penduduk usia produktif yang berpendidikan berarti semakin mampu suatu daerah untuk mengembangkan aktivitas ekonominya. Indikator yang biasa digunakan adalah indikator *dependency ratio* yang menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu daerah. Pembangunan di bidang kependudukan dikatakan berhasil jika nilai *dependency rationya* rendah. Semakin rendahnya nilai *dependency ratio* berarti semakin rendah angka beban ketergantungan karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa angka beban ketergantungan di Kabupaten Mappi pada Tahun 2020 sebesar

58,43. Hal ini berarti untuk setiap 100 jiwa penduduk usia produktif harus menanggung 58 hingga 59 jiwa penduduk bukan usia produktif. Penduduk bukan usia produktif yang harus di tanggung tersebut terdiri dari penduduk usia muda terlihat dari *Youth Dependency Ratio (YDR)* dan juga penduduk tua terlihat dari *Old Dependency Ratio (ODR)*. Dapat diketahui bahwa angka beban ketergantungan di Kabupaten Mappi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,55. Dengan adanya peningkatan angka ketergantungan tersebut maka semakin bertambah jumlah penduduk bukan usia produktif yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

**Tabel 3.2 Angka Ketergantungan Penduduk Kabupaten Mappi
Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Usia Produktif	Usia Tidak Produktif		Dependency Ratio	YDR	ODR
	15-64	0-14	65+			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
L	29.961	24.372	1.585	86,64	81,35	5,29
P	27.502	23.301	1.574	90,45	84,72	5,72
L+P	57.463	47.673	3.159	88,46	82,96	5,50

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2021

<https://mappikab.bps.go.id>

BAB IV

GAMBARAN IPM DI KABUPATEN MAPPI



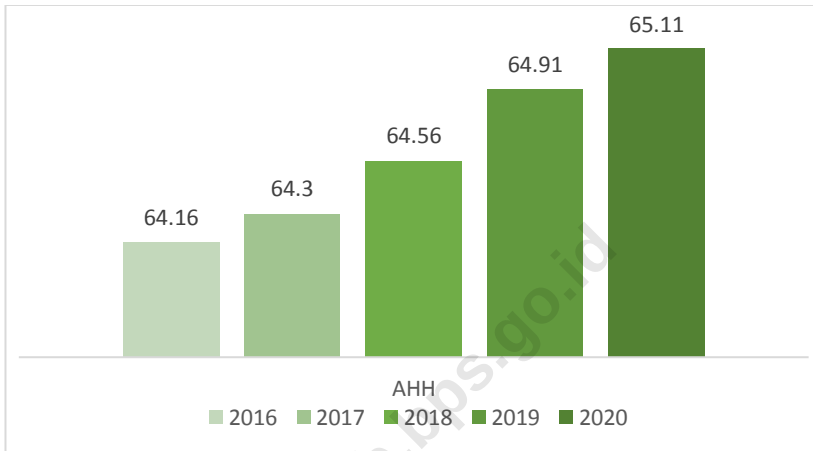
4.1 Komponen IPM

4.1.1 Angka Harapan Hidup (e_0)

Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

Pada gambar 4.1 di bawah terlihat bahwa pada tahun 2020 AHH Kabupaten Mappi yaitu sebesar 65,11 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa AHH mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan dalam bidang kesehatan meskipun tidak begitu besar. Dan tentunya diharapkan akan terus meningkat sehingga kualitas fisik penduduk pun dapat dinilai lebih baik.

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mappi tahun 2016 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

4.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

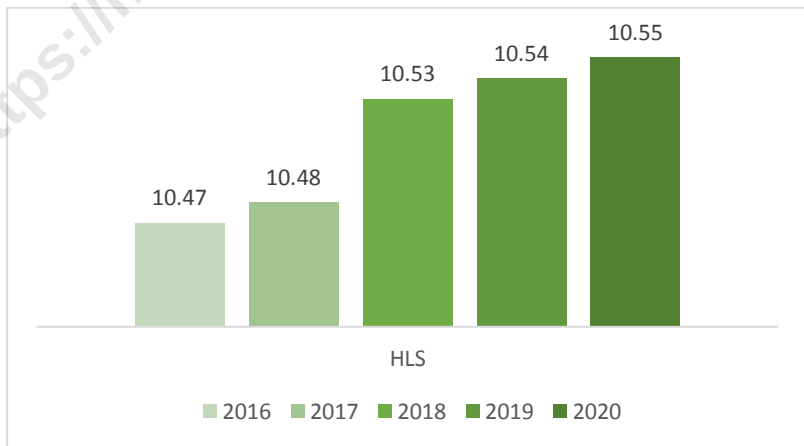
Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah.

Pada tahun 2020, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Mappi sebesar 10,55 tahun. Dengan kata lain, kemungkinan seorang anak berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Mappi yang sedang bersekolah dapat meneruskan

pendidikannya hingga kurang lebih 10 tahun mendatang. Angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya namun tidak begitu signifikan.

HLS di Kabupaten Mappi masih berada jauh di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun, sehingga pemerintah Kabupaten Mappi harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kabupaten Mappi. Pada gambar 4.2 terlihat bahwa HLS Kabupaten Mappi mengalami peningkatan 0.01 tahun dari tahun sebelumnya dan hal ini tentunya dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena peningkatan HLS yang kecil.

**Gambar 4.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020**



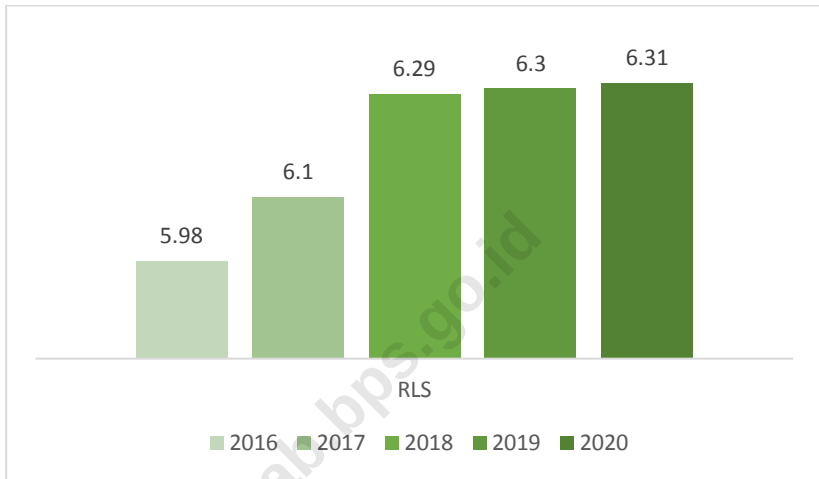
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

4.1.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Mappi tahun 2020 sebesar 6,31 tahun. Dengan kata lain penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Mappi telah menjalani pendidikan formal rata-rata 6 sampai 7 tahun atau mencapai kelas 6 SD hingga SMP kelas 1. Keadaan ini diharapkan bisa menjadi *early warning* bagi pemerintah dalam mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Mappi.

Pada gambar 4.3 dapat dilihat diagram rata-rata lama sekolah/*Mean Years School* (MYS) Kabupaten Mappi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa selama lima tahun telah terjadi peningkatan angka RLS, yang berarti telah terjadi peningkatan pada bidang pendidikan, namun masih jauh dari harapan nasional. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk maka semakin baik pula kualitas penduduk tersebut dan lebih memungkinkan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

**Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Mappi
Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

4.1.4 Pengeluaran Riil yang Disesuaikan

Sebagai indeks komposit, IPM mengandung beberapa komponen yang merepresentasikan kondisi aspek yang terkait. Komponen ekonomi direpresentasikan melalui aspek pengeluaran. Karena besarnya pengeluaran yang berbeda-beda di setiap distrik, desa bahkan di setiap rumahtangga, maka angka pengeluaran riil diwujudkan dalam nilai rata-rata Kabupaten.

Komponen ini diperoleh dari survei sosial ekonomi nasional pada modul konsumsi. Rata-rata pengeluaran konsumsi riil merupakan komponen dalam penyusunan Indeks

BAB IV GAMBARAN IPM KABUPATEN MAPPI

Standar Hidup. Selanjutnya dilakukan penyesuaian (*adjustment*) dengan formula *Atkinson*.

Berbeda dengan komponen kesehatan dan pendidikan, komponen pengeluaran riil ini sangat sensitif terhadap waktu maupun kebijakan berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pengeluaran suatu rumah tangga diukur melalui survei terhadap pengeluaran rumah tangga dan individu selama seminggu, sebulan dan setahun yang lalu. Walaupun dalam kenyataannya pengeluaran yang meningkat tidak bisa serta merta dimaknai dengan meningkatnya kesejahteraan secara empirik, hal itu dikarenakan adanya unsur inflasi/kenaikan harga yang juga cenderung naik dari waktu ke waktu. Namun demikian setidaknya dari besarnya rata-rata pengeluaran riil ini sedikit banyak memenuhi syarat reabilitas sebagai komponen ekonomi.

Pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Mappi mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir (2016-2019), namun pada tahun 2020 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan sosial rumah tangga. Dari hasil penghitungan, diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Mappi tahun 2020, yaitu sekitar Rp 6.353.000,-per

tahun. Dibanding dengan pencapaian pengeluaran riil yang ideal sebesar Rp 26.572.352,- bisa dikatakan kemampuan penduduk Kabupaten Mappi untuk memenuhi penghidupan yang layak masih di bawah kebutuhan minimal. Hal ini mengindikasikan pembangunan manusia di Kabupaten Mappi ke depannya perlu lebih memfokuskan peningkatan pembangunan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhannya maupun pemerataan hasilnya.

Gambar 4.4 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Mappi (ribu rupiah) 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mappi

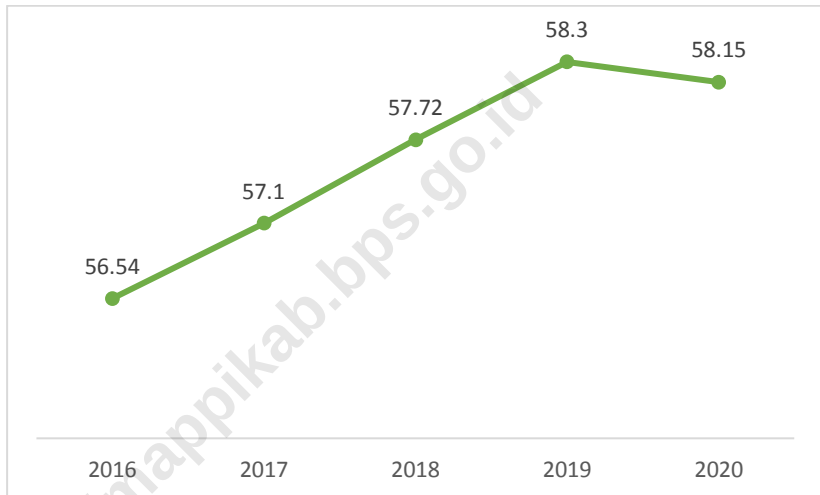
Sebagai Indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Pada Gambar 4.5 menunjukkan adanya peningkatan pada angka IPM Kabupaten Mappi dari tahun 2016 hingga 2020. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah setempat dalam hal pembangunan manusia. Meskipun demikian, capaian IPM sebesar 58,15 pada tahun 2020 di Kabupaten Mappi. Menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), IPM Kabupaten Mappi masih masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia rendah dengan angka capaian IPM kurang dari 60,00.

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Mappi tercermin pada angka IPM, yang pada tahun 2020 mencapai angka 58,15. Angka ini terus meningkat mulai tahun 2016 hingga tahun 2019, namun terjadi penurunan angka indeks pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi

Covid-19. Hal ini sebenarnya menunjukkan perbaikan positif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mappi.

Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dapat dilihat pada Gambar 4.6 IPM Kabupaten Mappi tahun 2020 masih menempati urutan ke-13 dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, yang pada tahun 2019 juga menempati urutan ke-13 di Provinsi Papua. Apabila dirinci menurut Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Papua, pencapaian IPM tertinggi terjadi pada Kota Jayapura dan Kabupaten Mimika, dengan pencapaian masing-masing sebesar 79,94 dan 74,19.

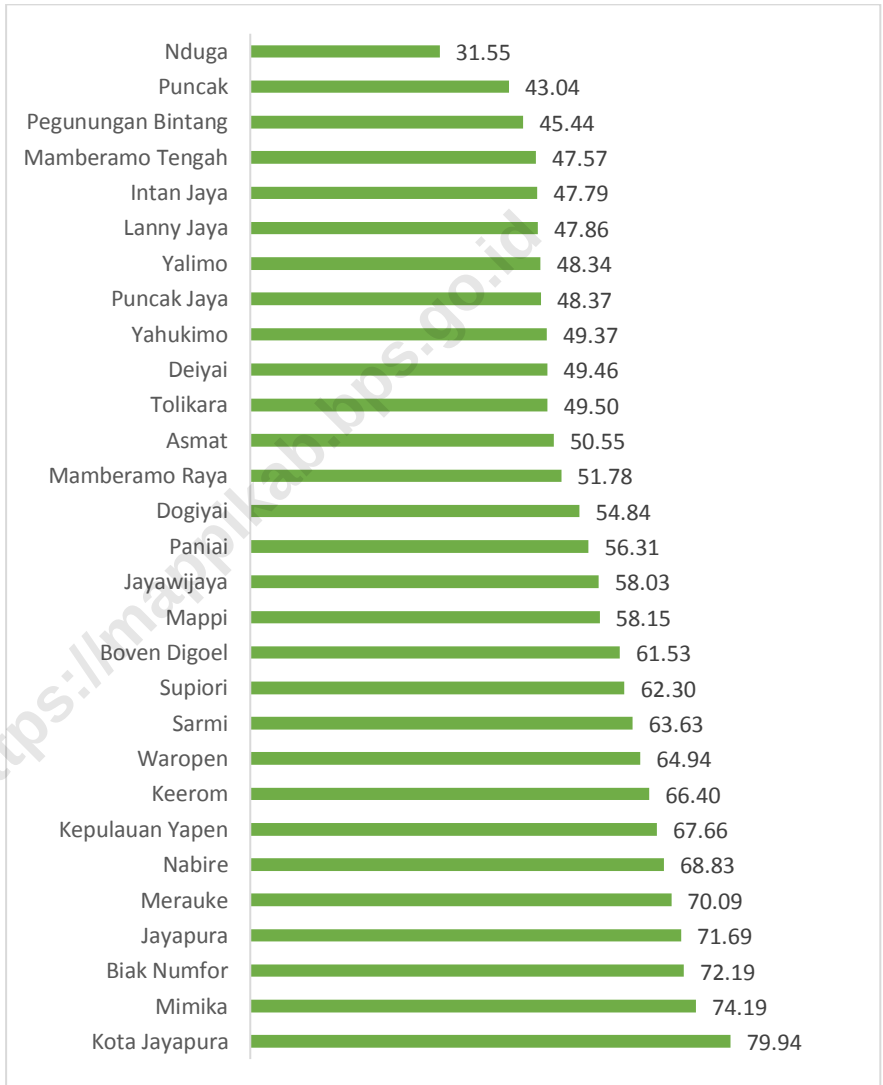
BAB IV GAMBARAN IPM KABUPATEN MAPPI

Berdasarkan besaran IPM pada tahun 2020 ini, ada 17 kabupaten yang termasuk dalam kategori rendah, 7 kabupaten yang masuk dalam kategori sedang dan 5 kabupaten yang masuk di kategori tinggi. Pada tahun sebelumnya, Kota Jayapura berada pada kategori sangat tinggi, namun pada tahun ini kota Jayapura turun ke kategori tinggi.

Penurunan angka indeks IPM hampir seluruhnya terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya. Terutama di wilayah Kabupaten/Kota yang terdampak pandemi menunjukkan penurunan angka indeks yang cukup signifikan.

BAB IV GAMBARAN IPM KABUPATEN MAPPI

Gambar 4.6 Capaian IPM per-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

BAB IV GAMBARAN IPM KABUPATEN MAPPI

4.3 Laju Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pada tabel 4.1 menunjukkan adanya perubahan selama periode 2019 - 2020, laju pertumbuhan menunjukkan angka negatif sebesar -0,257. Artinya IPM Kabupaten Mappi tahun 2020 mengalami penurunan angka indeks dibandingkan IPM tahun 2019 sebesar -0,257 persen.

Tabel 4.1 Perkembangan IPM dan Komponennya di Kabupaten Mappi Tahun 2019-2020

Komponen IPM	2019	2020	Laju Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (Tahun)	64,91	65,11	-0,257
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	10,54	10,55	
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,30	6,31	
Pengeluaran Riil yang Disesuaikan (000 Rp)	6.513	6.353	
IPM	58,30	58,15	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

BAB V

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN



Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas melalui bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan formal maupun informal.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih melanjutkan program wajib belajar menjadi 12 tahun.

Tercapainya target pendidikan suatu daerah tercermin dari beberapa indikator seperti harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan juga kualitas pelayanan pendidikan.

5.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Mappi dalam pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah diharapkan akan dapat memberikan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengkaji partisipasi sekolah merupakan suatu

indikator proses yang menunjukkan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan diimplementasikan di masyarakat. Dalam hal ini ukuran-ukuran yang digunakan adalah angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM).

5.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah atau berkesempatan menikmati akses pendidikan, akan tetapi kita tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/ menikmati pendidikan.

Pada tahun 2020, partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 86,91 persen, partisipasi sekolah anak usia 13-15 sebesar 82,06 persen, dan usia 16-18 sebesar 53,87. Data tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun lebih besar dibanding 12 tahun ke atas. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Mappi cenderung aktif bersekolah pada usia 7-12 tahun.

Dari Tabel 5.1 di bawah terlihat bahwa APS pada kelompok umur 7-12 untuk penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki yaitu sebesar 88,03 persen untuk penduduk perempuan dan 85,99 persen untuk penduduk laki-laki. Berbeda dengan kelompok umur 13-15 tahun terlihat

bahwa penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Serta, untuk kelompok umur 16-18 terlihat bahwa APS penduduk perempuan lebih besar daripada APS penduduk laki-laki.

Tabel 5.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi, Tahun 2020

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	85,99	82,17	65,75
Perempuan	88,03	81,95	82,06
Laki-laki + Perempuan	86,91	82,06	53,87

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mappi 2020

5.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu. Secara umum APK dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

BAB V PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sesuai dengan tujuan strategis Kemendikbud pada tahun 2016-2020 yaitu peningkatan partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah, sasaran yang ingin dicapai adalah APK SD/Sederajat sekurang-kurangnya 100,55 persen; APK SMP/Sederajat sekurang-kurangnya 83,77 persen; APK SMA/Sederajat sekurang-kurangnya 85,71 persen.

Tabel 5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Mappi, Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	108,99	79,99	62,85
Perempuan	131,92	51,38	46,20
Laki-laki + Perempuan	119,28	65,69	54,51

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mappi 2020

Pada tabel 5.2 menunjukkan APK Kabupaten Mappi pada tingkat pendidikan SD sudah mencapai target Kemendikbud yaitu sebesar 119,28 persen, namun pada tingkat SMP dan SMA masih jauh dari target yaitu hanya mencapai 65,69 dan 54,51. Hal ini menandakan perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan partisipasi sekolah di tingkat SMP dan SMA. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, APK untuk jenjang SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan.

5.1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat menunjukkan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini berguna untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dengan demikian APM akan mencapai 100 persen apabila seluruh anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

Sesuai dengan tujuan strategis Kemendikbud pada tahun 2016-2020, sasaran yang ingin dicapai adalah APM SD/Sederajat sekurang-kurangnya 85,20 persen; APM SMP/Sederajat sekurang-kurangnya 73,72 persen; APM SMA/Sederajat sekurang-kurangnya 67,50 persen.

Pada Tabel 5.3 di bawah menunjukkan capaian APM Kabupaten Mappi tahun 2020 di tingkat SD/Sederajat sebesar 83,60 persen yang berarti dari 100 penduduk usia 7-12 tahun terdapat 83 hingga 84 anak 7-12 tahun yang tepat bersekolah di jenjang SD/Sederajat. Jika dibandingkan dengan target Kemendikbud dapat di artikan bahwan APM Kabupaten Mappi tahun 2020 di tingkat SD/Sederjat belum mencapai target yang ditentukan oleh Kemendikbud RI. Apabila dibandingkan dengan

BAB V PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

APM SD pada tahun 2019 dengan angka 83,25, dapat disimpulkan APM pada jenjang SD di tahun 2020 terjadi peningkatan angka indeks.

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi, Tahun 2020

Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	82,09	41,84	21,85
Perempuan	85,44	31,80	16,89
Laki-laki + Perempuan	83,60	36,82	19,36

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mappi 2020

Namun pada tingkat SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat masih jauh dari target Kemendikbud RI yaitu hanya sebesar 36,82 dan 19,36. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk mencapai target APM pada jenjang SD SMP dan SMA. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa APM perempuan di jenjang pendidikan SD lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan SMP dan SMA dapat dilihat bahwa APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

5.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pada Tabel 5.4 diketahui bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Mappi terdapat 27,77 persen penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah, atau dengan kata lain dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Mappi terdapat 27 hingga 28 yang masih bersekolah. Berdasarkan status pendidikan, dapat dilihat bahwa partisipasi sekolah terbesar adalah SD dengan persentase penduduk sebesar 19,37 persen. Selanjutnya, sebesar 15,23 persen penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan 57 persen yang tidak bersekolah lagi. Dari tabel di bawah juga menunjukkan kesenjangan partisipasi sekolah antara penduduk laki-laki dan perempuan rendah, hal ini dapat dilihat dari selisih partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan sedikit. Secara umum, partisipasi sekolah penduduk laki-laki dan

penduduk perempuan terdapat perbedaan meskipun tidak begitu signifikan. Dengan demikian masih diperlukan usaha atau kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatasi rendahnya partisipasi sekolah tersebut.

Tabel 5.4 Persentase Penduduk Kabupaten Mappi Usia 5 tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah Tahun 2020

Partisipasi Sekolah		Jenis Kelamin		Laki-laki + Perempuan
		Laki-laki	Perempuan	
(1)		(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah bersekolah		12,35	18,38	15,23
Masih bersekolah	SD/ sederajat	18,65	20,16	19,37
	SMP/ sederajat	5,13	3,61	4,40
	SMA/ sederajat	4,13	3,86	4,00
Tidak bersekolah lagi		59,74	53,99	57,00
Jumlah		100	100	100

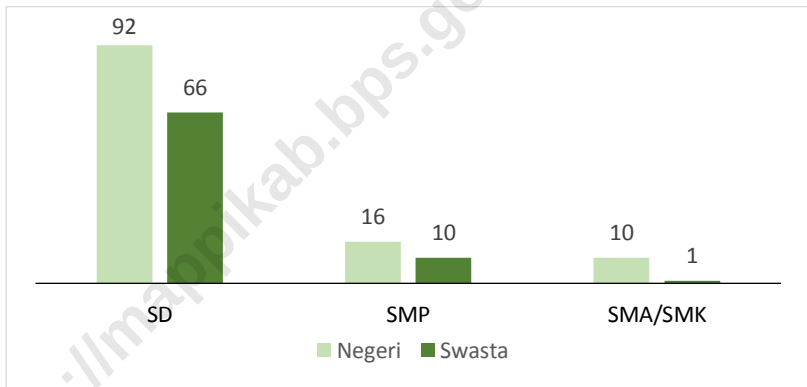
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mappi 2020

5.3 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu indikator tercapainya pembangunan pendidikan nasional adalah dengan tercapainya kualitas pelayanan pendidikan yang baik. Fasilitas pendidikan yang baik dan memenuhi standar nasional pendidikan mutlak disediakan oleh penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti sekolah, ruang kelas, dan tenaga pengajar. Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung.

Gambar 5.1 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2020



Sumber: Mappi dalam Angka, 2020

Gambar 5.1 menunjukkan jumlah sekolah yang merupakan prasarana inti dalam menunjang pembangunan pendidikan. Jumlah bangunan sekolah pada jenjang SD sebesar 92 yang berstatus negeri dan 66 SD yang berstatus swasta. Sedangkan pada tingkat SMP berjumlah 16 negeri dan 10 swasta. Begitu juga dengan jenjang SMA/SMK hanya berjumlah 10 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta.

Kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari beban guru yang diukur melalui indikator rasio kelas terhadap jumlah guru. Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat kekurangan atau kelebihan jumlah guru yang mengajar di kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standard ideal rasio guru yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu satu (1 kelas per 1 guru).

Indikator lain untuk mengukur beban guru adalah melalui rasio murid terhadap jumlah guru. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 tentang guru, standar ideal rasio murid terhadap guru adalah 20 : 1 (20 siswa untuk setiap guru).

Adapun untuk mengukur ketersediaan fasilitas pendidikan yaitu dengan melihat rasio murid terhadap jumlah kelas. Pada idealnya seorang guru menanggung beban sebanyak 28 siswa dalam satu kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan baik.

Pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa rasio murid-guru adalah 26-27 murid per satu guru untuk jenjang SD, 20-21 murid untuk jenjang SMP, dan 16-17 murid untuk jenjang SMA. Hal ini menunjukkan untuk rasio murid dan guru pada tingkat SMP dan SMA sudah mencapai ideal. Namun untuk tingkat pendidikan SD masih belum ideal.

Tabel 5.5 Rasio Murid-¹Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mappi Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Rasio
(1)	(2)
SD	26,74
SMP	20,54
SMA	16,78

Sumber: Mappi Dalam Angka, 2020

Catatan: ¹Jumlah Guru termasuk Kepala Sekolah dan Guru

<https://mappikab.bps.go.id>

BAB VI

PEMBANGUNAN KESEHATAN



Kondisi kesehatan merupakan bagian yang erat hubungannya dengan keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup (salah satu komponen IPM atau cermin keberhasilan pembangunan manusia), dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat.

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Masyarakat yang sehat tentunya didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Juga tentunya dipengaruhi oleh perilaku kebiasaan masyarakat itu sendiri. Program pembangunan kesehatan oleh pemerintah diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki derajat kualitas hidup yang tinggi, serta memiliki kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Oleh sebab itu indikator kesehatan menjadi sangat penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk maka semakin baik juga modal pembangunannya.

6.1 Fasilitas Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan

BAB VI PEMBANGUNAN KESEHATAN

prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakatpun tidak henti-hentinya dilaksanakan.

Tidak ketinggalan pula menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Sebagai contoh langkah yang ditempuh adalah memperbanyak penerimaan pegawai khususnya tenaga kesehatan. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai kiranya derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai.

Menurut *World Health Organization* (WHO), kunci strategis dalam menurunkan kematian ibu dan bayi saat proses persalinan adalah tersedianya tenaga kesehatan terlatih yang membantu dalam proses persalinan. Mengenai ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Mappi dapat dilihat pada tabel 6.1.

Dari Tabel di bawah dapat diketahui keberadaan dan jumlah fasilitas maupun tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Mappi tahun 2020. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Mappi tahun 2020 menurut perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mappi yaitu sebesar 108.295 jiwa. Dengan melihat angka fasilitas dan tenaga kesehatan pada tabel tersebut, dapat diketahui masih sangat minimnya fasilitas ataupun tenaga kesehatan di Kabupaten Mappi

dengan menanggung penduduk yang setiap tahunnya bertambah. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam hal peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat mendukung masyarakat yang sehat.

Tabel 6.1 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mappi Tahun 2020

No.	Fasilitas / Tenaga Kesehatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	Rumah Sakit	1
2.	Puskesmas	17
3.	Klinik/balai Kesehatan	1
4.	Posyandu	170
5.	Dokter	11
6.	Bidan	170
7.	Perawat	230
8.	Farmasi dan Ahli Gizi	34

Sumber: Mappi Dalam Angka, 2020

6.2 Tingkat Morbiditas

Angka morbiditas menunjukkan angka kesakitan yang dialami penduduk sedangkan rata-rata lama sakit mencerminkan kerugian materiil yang dialami masyarakat selama sakit. Seseorang dikatakan mengalami sakit apabila mendapatkan keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Kedua indikator ini diperoleh dari Susenas pada pertanyaan mengenai

BAB VI PEMBANGUNAN KESEHATAN

keluhan kesehatan yang dialami selama satu bulan sebelum pencacahan.

Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, misalnya pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal dibanding pekerja yang menderita sakit. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka morbiditas (angka kesakitan) dan rata-rata lama sakit.

Pada Tabel 6.2, dapat dilihat persentase penduduk Kabupaten Mappi yang sakit pada tahun 2020 menurut data Statistik kesejahteraan rakyat 2020 secara keseluruhan yaitu 11,51 persen penduduk laki-laki dan 11,20 persen penduduk perempuan. Semakin besar nilai indikator ini, semakin tinggi tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk dan semakin besar kerugian yang dialami.

Tabel 6.2 Presentase Penduduk yang Menderita Sakit di Kabupaten Mappi Tahun 2020

Jenis Kelamin	% Penduduk Sakit
(1)	(2)
Laki-laki	11,51
Perempuan	11,20
Laki-laki + Perempuan	11,36

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

6.3 Kesehatan Balita

Kesehatan balita merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Artinya bahwa, suatu bangsa akan dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila tingkat kesehatan balita memiliki angka yang baik pula. Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain di antaranya adalah penolong kelahiran. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dianggap lebih baik dibandingkan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.

Tabel 6.3 menjelaskan bahwa persentase penolong persalinan oleh tenaga medis di Kabupaten Mappi sebesar 57,80

persen dan sisanya 42,2 persen ditolong oleh tenaga non medis. Hal ini bisa dikatakan sudah cukup baik untuk mencegah peluang terjadinya kasus kematian ibu, meskipun demikian peran tenaga medis masih perlu di tingkatkan. Dapat dilihat juga bahwa peran tenaga bukan medis (dukun/famili/lainnya) dalam persalinan di kabupaten Mappi masih banyak sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Berdasarkan tingkat pendidikan, penolong persalinan oleh tenaga kesehatan kepada ibu melahirkan dengan tingkat pendidikan SD cenderung lebih rendah dibandingkan pendidikan SMP ke atas. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena tingkat pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup bayi. Perlunya penyuluhan pra dan pasca melahirkan kepada ibu dengan pendidikan SD agar kualitas hidup bayinya meningkat.

Upaya yang mungkin untuk meningkatkan angka persalinan oleh tenaga medis adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga medis dan menempatkan mereka dipuskesmas/pustu di distrik/kampung-kampung. Alternatif lainnya adalah dengan melatih tenaga-tenaga non medis agar lebih terampil menolong persalinan dengan menggunakan peralatan yang lebih bersih dan higienis.

Tabel 6.3 Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mappi Tahun 2020

Karakteristik	Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
(1)	(2)
SD ke bawah	49,90
SMP ke atas	67,48
Mappi	57,80

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Selain penolong persalinan, derajat kesehatan juga dapat diukur oleh pelayanan imunisasi balita. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Semakin tinggi indikator ini, menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diterima Balita. Imunisasi sangat penting diberikan kepada balita sebagai langkah pencegahan penyakit. Oleh karena itu, memperluas jangkauan imunisasi kepada seluruh balita menjadi pekerjaan rumah yang harus disegerakan pencapaiannya.

6.4 Perumahan dan Lingkungan

Salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat adalah pola hidup sehat dan lingkungan yang sehat. Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi lebih jauh lagi sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Bahkan menurut Jatman

(1948:170) rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup, simbol status dan juga menunjukkan identitas pemiliknya.

Secara umum kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan bagi penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Menurut UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

6.4.1 Fasilitas Rumah Tinggal

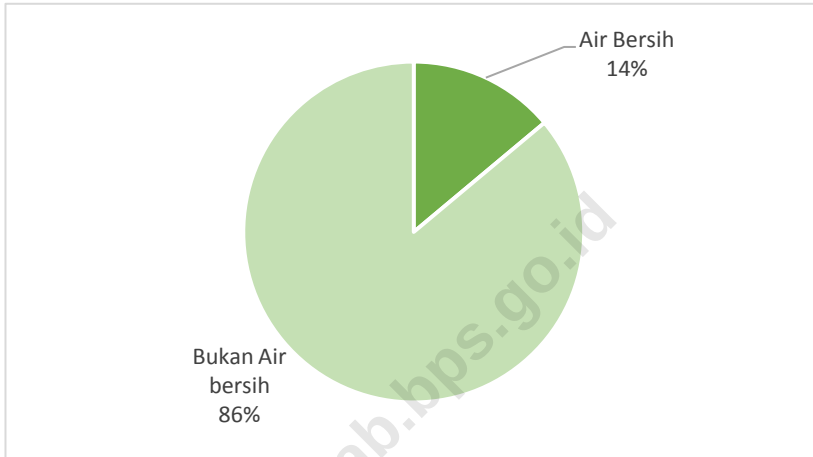
Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta tersedianya fasilitas MCK.

Fasilitas air minum bersih adalah faktor yang sangat menentukan, karena air minum selalu dikonsumsi oleh masyarakat tiap harinya. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup “air bersih”, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya. Dalam publikasi Statistik Kesra BPS disebutkan yang dimaksud air bersih adalah air minum yang bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 meter dari pembuangan limbah terdekat.

Dari hasil Susenas, pada tahun 2020 Penyediaan air minum bersih di Kabupaten Mappi masih sangat kurang baik. Pada Gambar di bawah dapat dilihat bahwa secara keseluruhan hanya terdapat 14 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan selebihnya sebanyak 86 persen rumah tangga menggunakan sumber air minum bukan air bersih. Sama halnya dengan sumber air minum yang layak serta akses air layak masih tergolong sedikit anggota rumah tangga yang mendapatkan akses dan sumber air minum layak.

BAB VI PEMBANGUNAN KESEHATAN

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih, 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Pada Tabel 6.4 dibawah dapat juga dilihat persentase rumah tangga berdasarkan sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk keperluan memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Terdapat tiga sumber terbesar air utama yang diperoleh yakni berasal dari sumur/mata air terlindung, sumur/mata air tidak terlindung, dan lainnya (air sungai dan air hujan). Sumber air utama terbesar yang diperoleh berasal dari sumur/mata air tidak terlindung yaitu sebesar 58,39 persen. Sumber air berasal dari lainnya (air hujan, sungai) sebesar 27,69 persen, dan sumur/mata air terlindung sebesar 10,14 persen. Sementara itu, sumber air kemasan /isi ulang dan sumur bor/pompa sangat sedikit penggunaanya.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll, 2020

Karakteristik	Sumber Air Utama untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll				
	Air Kemasan / Isi Ulang	Sumur Bor / Pompa	Sumur/ Mata Air Terlindung	Sumur / Mata Air Tidak Terlindung	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin KRT					
Laki-laki	0,00	4,09	10,27	58,72	26,92
Perempuan	0,00	1,69	9,26	56,22	32,83
Pendidikan Tertinggi KRT					
SD ke bawah	0,00	0,86	9,08	60,02	30,03
SMP ke atas	0,00	8,80	11,95	55,58	23,66
Mappi	0,00	3,78	10,14	58,39	27,69

*Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll.

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

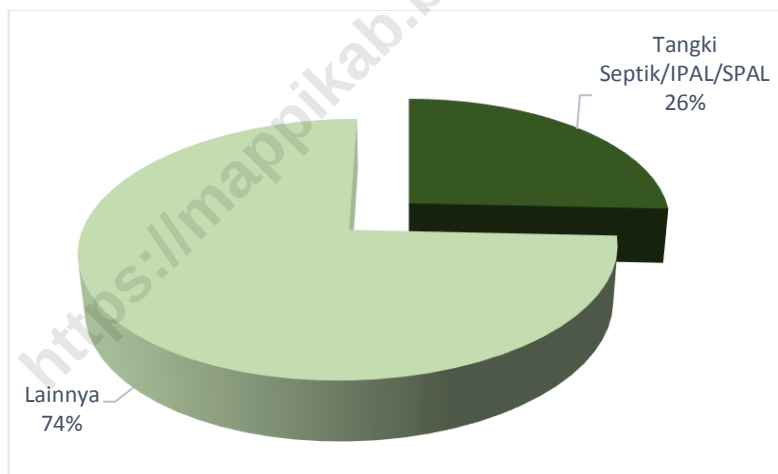
Selain itu, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik, sedangkan jamban umum (di sungai/kali atau tempat umum lainnya) dan tidak menggunakan jamban (di kebun/lading/hutan/ dan sejenisnya) berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air

BAB VI PEMBANGUNAN KESEHATAN

besar pada tempat umum atau sembarang tempat akan semakin besar efek terhadap sanitasi lingkungan.

Dari Gambar 6.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 persentase rumah tangga di Kabupaten Mappi yang memiliki fasilitas pembuangan akhir tinja. Tempat pembuangan akhir tinja yang terutama adalah tangki septik/IPAL/SPAL sebesar 26 persen dan lainnya sebesar 74 persen.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2020



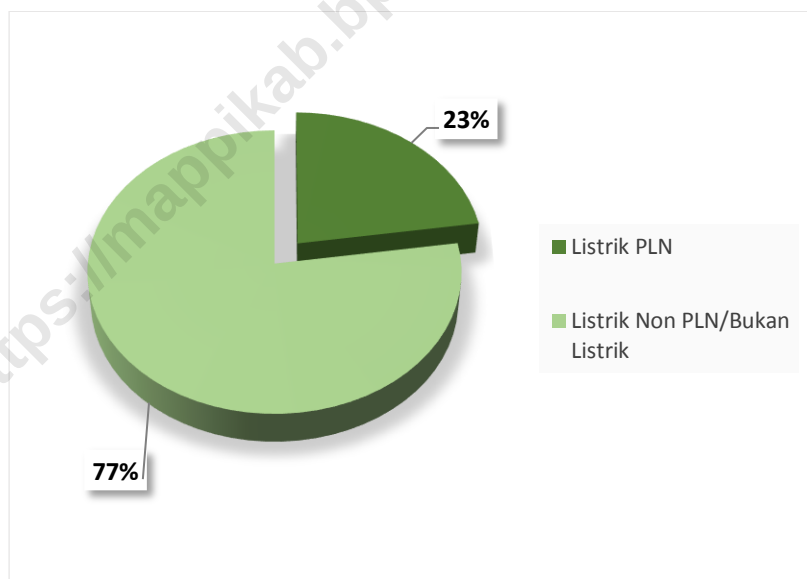
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Minimnya fasilitas air bersih dan sanitasi layak di Kabupaten Mappi terkhususnya di daerah perdesaan perlu ditindak lanjuti dengan segera oleh pemerintah daerah agar tidak menimbulkan

berbagai penyakit terkhususnya kejadian diare pada balita dan penyakit mematikan lainnya.

Fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Penerangan di Kabupaten Mappi, 2019



Sumber: Susenas, 2019

Gambar 6.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2019, secara umum persentase rumah tangga di Kabupaten Mappi yang memiliki

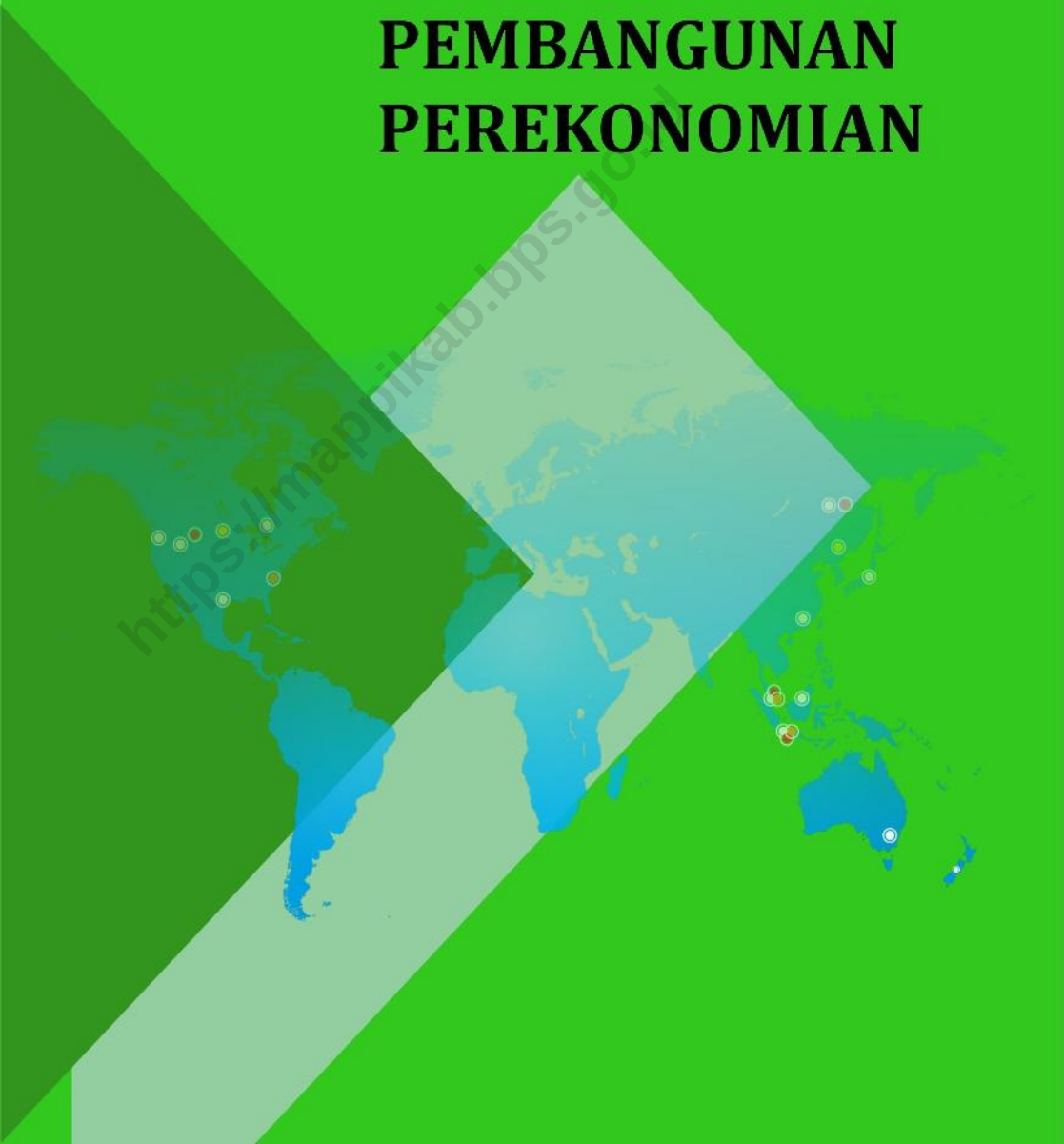
BAB VI PEMBANGUNAN KESEHATAN

sumber penerangan berupa listrik PLN sebesar 23,65 persen; yang memiliki sumber penerangan berupa listrik non-PLN dan bukan listrik sebesar 76,35 persen;

Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sangat banyak rumah tangga di Kabupaten Mappi yang tidak menggunakan listrik baik itu listrik PLN maupun Non-PLN sebagai sumber utama penerangan dalam rumah. Rendahnya persentase pengguna listrik dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti belum masuknya listrik PLN di berbagai wilayah di Kabupaten Mappi, sulitnya akses ke setiap wilayah di Kabupaten Mappi sehingga rumah tang yang tangga jauh dari perkotaan kesulitan mendapatkan bahan bakar untk listrik non-PLN, dan kebiasaan masyarakat perdesaan yang masih merasa nyaman dengan penerangan seadanya seperti pelita, obor, dan lilin.

BAB VII

PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN



7.1 Pendapatan dan Pengeluaran

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya, sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Di negara-negara yang lebih maju, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50%. Disamping itu, di negara-negara berkembang dari segi pemerataan pendapatan masih sulit diwujudkan. Dalam usaha pemerataan pendapatan ini pemerintah

berusaha memberantas kemiskinan dengan jalan pemerataan pembangunan, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemerataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

7.1.1 Distribusi Pendapatan – Rasio Gini Penduduk

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain gini rasio dan kriteria Bank Dunia.

Gini rasio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai gini rasio mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila gini rasio mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. *Gini ratio* dibagi dalam tiga kategori:

- a) $GR > 0,5$ keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan tinggi.
- b) $GR 0,3 - 0,5$ keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang.
- c) $GR < 0,3$ keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah.

Kriteria Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40% penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria :

- a) Bila menerima kurang dari 12% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi.
- b) Bila menerima 12% - 17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang.
- c) Bila menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Mappi pada tahun 2020 adalah sebesar 0,43 yang berarti berdasarkan kriteria Bank Dunia maupun rasio gini, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Mappi termasuk kategori ketimpangan sedang. Rasio Gini pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,42.

Gambar 7.1 *Gini Ratio* Kabupaten Mappi Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2020

7.1.2 Pengeluaran Penduduk

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50%) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita.

Berdasarkan Susenas 2020, rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita kabupaten Mappi adalah Rp. 701.155,- Sedangkan

untuk penghitungan IPM digunakan nilai konsumsi minimum perkapita yaitu Rp. 360.000,-. Dengan demikian rata-rata pengeluaran/konsumsi perkapita Kabupaten Mappi sudah berada di atas nilai minimal yang telah ditetapkan. Adapun pengeluaran perkapita makanan sebesar Rp. 398.141,- dan untuk non makanan sebesar Rp.701.155,-. Data tersebut mengindikasikan pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Mappi lebih besar untuk komoditi makanan di bandingkan komoditi non makanan. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi wilayah di Kabupaten Mappi yang pada dasarnya masih daerah tertinggal sehingga pola konsumsi rumah tangga masih lebih besar untuk komoditi makanan.

Tabel 7.1 Rata-rata pengeluaran perkapita per bulan Kabupaten Mappi Tahun 2020 (Rupiah)

Kabupaten	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Mappi	398.141	303.014	701.155

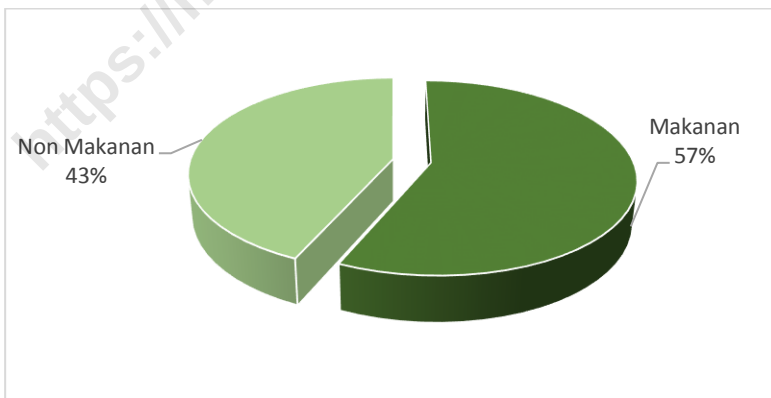
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Gambar 7.2 menunjukkan bahwa persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Hasil Susenas 2020 menunjukkan, secara umum perbandingan komposisi pengeluaran

BAB VII PEMBANGUNAN EKONOMI

makanan dan non makanan di Kabupaten Mappi belum mengikuti pola pengeluaran negara maju dimana pengeluaran untuk kelompok makanan masih lebih dominan dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Pengeluaran konsumsi makanan per bulan pada tahun 2020 sebesar 57 persen dan non makanan sebesar 43 persen. Hal ini dapat disebabkan karena pada umumnya kelompok penduduk berpendapatan rendah mengeluarkan pendapatannya lebih besar untuk kebutuhan dasar seperti kebutuhan konsumsi individu seperti makanan, pakaian, dan perumahan, mapupun kebutuhan pelayanan sosial seperti air minum, sanitasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan (Anwar, 2008).

Gambar 7.2 Persentase pengeluaran Rumah Tangga menurut jenis pengeluaran (makanan dan non makanan) di Kabupaten Mappi Tahun 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

7.2 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu, ketenagakerjaan juga merupakan aspek mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang berarti dapat menjadi penggerak utama ketiga aspek komponen IPM, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Setiap upaya pembangunan kemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran.

7.2.1 Penduduk Usia Kerja dan Status Bekerja

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya

BAB VII PEMBANGUNAN EKONOMI

bekerja, dan atau sementara tidak bekerja, dan atau sedang menganggur (tidak punya pekerjaan).

Dari tabel 7.2 terlihat bahwa secara total pada tahun 2020 terdapat 64,09 persen dari total seluruh penduduk di Kabupaten Mappi merupakan angkatan kerja. Dari 64,09 persen penduduk yang tergolong angkatan kerja terdapat 94,23 persen penduduk yang berstatus bekerja dan 5,77 persennya berstatus tidak bekerja/pengangguran. Partisipasi laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar daripada wanita. Dominasi laki-laki dalam pasar tenaga kerja dimungkinkan karena terkait erat dengan budaya bahwa laki-lakilah yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Meskipun persentase penduduk yang bekerja cukup besar namun perlu ditinjau lagi dari segi jenis pekerjaan yang sedang dilakukan, lapangan usaha pekerjaan, jabatan, dll. Disamping itu, penduduk yang berstatus menganggur angkanya masih diatas dari angka nasional yaitu sebesar 5,50 persen, dimana angka penganggur sebesar 5,77 persen. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah setempat untuk tetap mengusahakan penekanan angka pengangguran tersebut agar dapat dipertahankan dibawah 5,50 persen.

**Tabel 7.2 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mappi
Tahun 2020 (persen)**

Indikator Ketenagakerjaan	2020
(1)	(4)
Penduduk Angkatan kerja (%)	64,09
Penduduk berstatus Bekerja (%)	94,23
Penduduk Tidak bekerja/Penganggur (%)	5,77

Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2020

7.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sesuai dengan definisi dari BPS dan Depnaker, dalam publikasi ini digunakan konsep penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun keatas. TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah angkatan kerja, dimana TPAK adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020, TPAK Kabupaten Mappi tercatat sebesar 64,09 persen yang berarti 64,09 persen penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

BAB VII PEMBANGUNAN EKONOMI

berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian. Sedangkan sisanya 35,91 persen adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya). Dilihat dari sisi gender, TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Berdasarkan hasil Sakernas 2020, TPAK laki-laki sebesar 80,11 persen dan TPAK perempuan sebesar 47,58 persen yang berarti laki-laki lebih dominan berperan dalam perekonomian di Kabupaten Mappi.

Gambar 7.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Mappi, 2020

7.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka (open unemployment) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari:

- a) Mereka yang mencari pekerjaan.
- b) Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c) Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

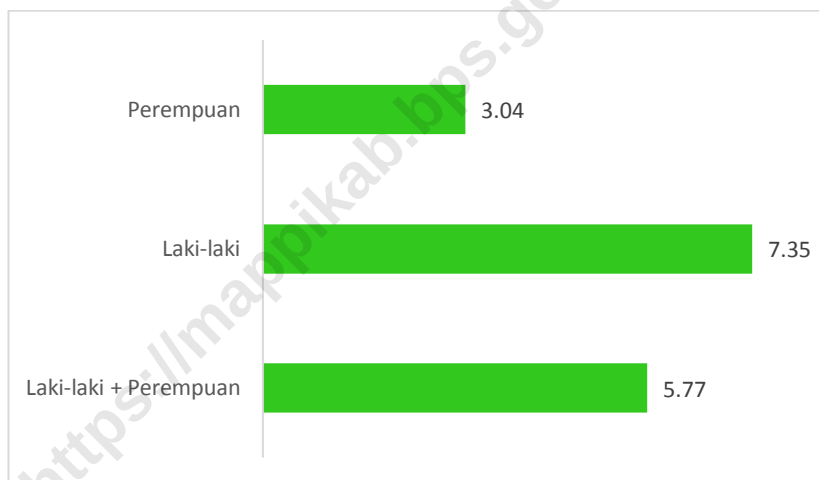
Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi diantara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan masih mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut dia akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 7.4 menunjukkan TPT di Kabupaten Mappi tahun 2020 adalah sebesar 5,77 persen. Artinya, bahwa hampir seluruh angkatan kerja memiliki status bekerja atau dengan kata lain hampir tidak ada penduduk yang menganggur. TPT yang kecil disebabkan karena biasanya dalam satu rumah tangga, pekerjaan

BAB VII PEMBANGUNAN EKONOMI

bertani/berkebun dilakukan secara bersama-sama antara anggota rumah tangga yang satu dengan yang lain, sehingga meskipun status seseorang hanya sekedar “membantu”, tetap diklasifikasikan sebagai bekerja. Ditinjau dari segi gender, terlihat bahwa TPT penduduk laki-laki di Kabupaten Mappi lebih besar daripada penduduk perempuan.

Gambar 7.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Mappi Tahun 2020



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, 2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAPPI**

Jalan Poros Agham, Km. 05, Kepi, Mappi, Papua
Homepage: [//mappikab.bps.go.id/](http://mappikab.bps.go.id/)